

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NOMOR: 021 /HK.08/K.SN-21/03/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan bahwa Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan keterangan dalam persidangan PHPU dan PHP;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk tim yang akan mempersiapkan dan menyusun keterangan tertulis perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

- 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

a. Pengarah

1. Memastikan Bahan Awal Keterangan Tertulis PHPU telah

sesuai format, substansi, dokumen bukti, berisi narasi dan dokumen pendukung berdasarkan pelaksanaan Tugas Divisi Pengawas Pemilu dan pelaksanaan Tugas Pengawasan tahapan Pemilu;

2. Memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi.

b. Penanggung Jawab

1. Mereviu dan memastikan Bahan Awal Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai format, substansi, dokumen bukti, dan berisi narasi dan dokumen pendukung berdasarkan pelaksanaan Tugas Divisi Pengawas Pemilu dan pelaksanaan Tugas Pengawasan tahapan Pemilu serta memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
2. Mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

c. Sekretaris

Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan Bahan Awal, penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal.

d. Ketua

Menyusun dan mereviu Bahan Awal dan Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

e. Anggota

Melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada Tanggal 13 Maret 2024

KETUA,

ANDI HASNADI, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 021/HK.08/K.SN-21/03/2024
TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAJO

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAMTIM
1.	ANDI HASNADI, SH	KETUA	PENGARAH
2.	HERIYANTO, S.Sos.,M.A.P	ANGGOTA	PENGARAH
3.	ANDI SAMSIR, SH.,MH	ANGGOTA	PENGARAH
4.	HERWAN, SE	ANGGOTA	PENGARAH
5.	FAURIZAH, S.IP.,M.Si	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
6.	ANDI IRASETIAWATI, S.TP.,M.Si	KEPALA SEKERTARIAT	SEKRETARIS
7.	ANDI NURHALIM SINRANG, S.Sos	STAF TEKNIS ASN	KETUA
8.	ANDI ARFADI, S.Sos	STAF TEKNIS ASN	ANGGOTA
9.	ANDI ERWIN AB, SE	STAF TEKNIS ASN	ANGGOTA
10.	MUHAMMAD IHWAN, SE.,M.Si	STAF DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
11.	BESSE VIA BETADIAH MASRIYANTO, SH	STAF DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
12.	JASMAR, S.Pd	STAF DIVISI PENCEGAHAN	ANGGOTA
13.	EDIL ADHAR, A.Md	STAF DIVISI SDM	ANGGOTA
14.	ABDUL MALIK, A.Md	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA
15.	MUHAMMAD SYUKUR, S.Sos	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA


 KETUA
 ANDI HASNADI, SH